



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA KERJA

Tahun 2026



NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memiliki arti strategis sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Renja ini disusun untuk menilai tingkat pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, secara umum pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Berbagai capaian kinerja tersebut menjadi dasar dalam penyempurnaan perencanaan pada Tahun 2026 guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada Tahun 2026, selain melanjutkan dan mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah juga merumuskan program dan kegiatan strategis baru yang disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis, perkembangan kebijakan nasional dan daerah, serta kebutuhan penguatan ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya di daerah. Penyusunan Renja Tahun 2026 ini dimaksudkan untuk memastikan kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 disusun dengan sistematika yang meliputi Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Sebelumnya, Tujuan dan Sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, serta program dan kegiatan yang dilengkapi dengan indikasi kebutuhan pendanaan beserta sumber pembiayaannya dan prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 serta sebagai bahan evaluasi kinerja tahun berjalan.

Melalui penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan terwujud kejelasan arah kebijakan, keterpaduan program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung terwujudnya stabilitas daerah, demokrasi yang berkualitas, dan ketahanan nasional yang tangguh.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan akuntabel.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2026.

Semarang, 2025

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan,



Pradana Agung Nugraha, S.STP, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19820331 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2024	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	20
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	21
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	21
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	24
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024	24
4.2. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026	36
4.3. Dukungan Terhadap 36 Program Daerah	37
BAB V PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.....	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.....	15
Tabel 2.3	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.....	19
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.....	20
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026	23
Tabel 4.1	Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Jawa Tengah.....	25
Tabel 4.2	Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Sasaran/Program/Kegiatan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.....	36
Tabel 4.3	Dukungan Terhadap 136 Program Daerah Tahun 2026.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah diamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan PD.

Proses penyusunan Renja PD Tahun 2026 didasarkan pada penjabaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Rancangan Renja PD tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029. Lebih lanjut, penyusunan dokumen perencanaan ini juga diintegrasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang memuat prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Kerja (Renja PD) Tahun 2026. Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Asing di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
41. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD 2025-2029;
42. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 0007/0001565 tanggal 26 Februari 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 -2029;
43. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 000.7.2.2/0002764 tanggal 9 April 2025 tentang Penyusunan Rancangan Strategis (Renstra) dan Pelaksanaan Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat Daeah dalam Rangka Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029;
44. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor S/000.7.2.5/2025 tanggal 21 November 2025 tentang Penyempurnaa Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah :

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Tengah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026
- 4.2 Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
- 4.3 Dukungan Terhadap 136 Program Daerah

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dari Rencana Kerja Tahun 2026

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan 6 (enam) program dan 13 kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 860.224.920.000,- terdiri dari :

1. Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 8 kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terdiri dari 1 kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik terdiri dari 1 kegiatan sebagai berikut :
 - 3.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dari 1 kegiatan sebagai berikut :
 - 4.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari 1 kegiatan sebagai berikut :
 - 5.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dari 1 kegiatan sebagai berikut :
 - 6.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 serta berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026, hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan Umum										
	Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik										
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Ideologi Pancasila	Nilai	3,2		3	3,6	120	3,1		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang paham tindakan pencegahan ekstrimisme dan terorisme	Persentase	90		80	85,61	107,01	85		
		Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase	90		80	84,27	105,34	85		
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui	IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi	Nilai	77		75	90	120	76	-	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK										
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%)	Persentase	90		89	90,14	101,28	89,5	-	-
		Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%)	Persentase	90		89	91,24	102,52	89,5		
		Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik	Persentase	90		89	89,83	100,93	89,5		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	Indeks kinerja ormas	Nilai	79,82		75,34	80	106,19	77,87		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	ORGANISASI KEMASYARAKATAN										
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Skor variabel program dan kegiatan ormas	Skor	38,59		36,23	37,17	102,59	37,31		
		Skor variabel sumber daya ormas	Skor	41,23		39,11	40,25	102,91	40,56		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Penguatan Dampak Ekonomi	Nilai	3,1		3	3,21	107	3,2		
		Indeks Toleransi	Nilai	74,5		74,10	76,76	103,59	74,3		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase	90		85	85,52	100,61	87	-	-
		Persentase masyarakat yang paham terhadap	Persentase	90		85	87,16	102,54	87	-	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		ketahanan ekonomi, sosial dan budaya									
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Indeks kewaspadaan Nasional	Angka	74		73	80,60	110,41	73,5	-	-
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik sosial (%)	Persentase	100		100	100	100	100		
		Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Persentase	82		72	80,14	111,31	77		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Persentase	100		100	100	100	100	-	-
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase	100		100	100	100	100	-	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Laporan	100		100	100	100	100	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Laporan	36		12	12	100	12		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Laporan	36		12	12	100	12		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Standar Layanan	Persentase	100		100	100	100	100		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Persentase	100		100	100	100	100		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	123		41	41	100	41		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun	Laporan	252		84	84	100	84		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1.056		352	352	100	352		

Dari tabel di atas dapat disampaikan faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja pada program-program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebagai berikut :

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini memiliki 1 indikator yaitu Indeks Ideologi Pancasila yang tingkat capaian sangat tinggi sebesar 3,60 terhadap target RKPD. Strategi yang telah dilakukan yaitu melalui penguatan sinergitas antar stakeholder provinsi dengan kabupaten/kota melalui forum-forum diskusi. Selain itu, melakukan komunikasi yang intensif dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan jaringan masyarakat agar tercipta kolaborasi yang baik.

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Program ini memiliki 1 indikator yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional yang tingkat capaian sangat tinggi sebesar 80,60% terhadap target RKPD. Penyelenggaraan program ini dilakukan dengan meningkatkan soliditas dan pengkajian aparat intelijen, lembaga/ instansi dan masyarakat dalam deteksi dan cegah dini konflik sosial dan gangguan keamanan secara berkelanjutan, serta mendorong terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) pada tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan.

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini memiliki 1 indikator yaitu Indeks Kinerja Ormas yang tingkat capaian sangat tinggi sebesar 80% terhadap target RKPD . Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan edukasi dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan agar Ormas bisa berperan mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan konflik dengan cara damai serta peningkatan kelembagaan ormas guna mewujudkan kemandirian ormas.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Program ini memiliki 2 indikator dengan tingkat capaian sangat tinggi yaitu Indeks penguatan dampak ekonomi dan Indeks toleransi yang tingkat capaian sangat tinggi sebesar 3,21 dan 76,76% terhadap target RKPD. Penyelenggaraan program ini dengan mengoptimalkan forum-forum yang di masyarakat seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga meminimalisir konflik antar umat beragama. Selain itu perlu adanya peningkatan kerjasama dengan lembaga terkait untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, mahasiswa dan generasi muda lainnya

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Program ini memiliki 1 indikator dengan tingkat capaian sangat tinggi yaitu IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi yang tingkat capaian sangat tinggi sebesar 90% terhadap target RKPD. Strategi yang dilakukan dengan melakukan komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan seluruh Elemen Masyarakat dalam rangka antisipasi dan penanganan dini terhadap berbagai bentuk kerawanan dan gejolak politik pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 serta memberikan

Pendidikan Politik bagi seluruh elemen masyarakat Provinsi untuk meningkatkan partisipasi politik proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target kinerjanya semuanya melebihi target yang telah ditetapkan. Pencapaian hasil realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
				2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Ideologi Pancasila	-	-	3	3,1	3,6		
2	IDI Aspek Kebebasan dan Aspek Lembaga Demokrasi	-	-	75	76	90		
3	Indeks Kinerja Ormas	-	-	75,34	77,87	80		
4	Indeks Penguatan Dampak Ekonomi	-	-	3	3,1	3,21		
	Indeks Toleransi	-	-	74,10	74,3	76,76		
5	Indeks kewaspadaan Nasional	-	-	73	73,5	80,60		-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1. Kinerja Pelayanan OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah merupakan institusi teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintahan dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan serta membangun sistem politik yang demokratis guna mewujudkan program pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.

Pada tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2024 - 2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kestabilan politik;
- b. Meningkatnya Ketahanan bangsa.

Pencapaian sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan pada tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan.

2.3.2. Permasalahan yang Dihadapi

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Provinsi Jawa Tengah pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tugas, pokok dan fungsi adalah :

1. Bidang ideologi dan Kewaspadaan Nasional:
 - a. Perubahan perilaku masyarakat karena arus informasi yang deras melalui medsos yang berdampak terhadap ideologi bangsa secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu contoh perilaku tersebut ditunjukkan melalui ekspresi beragama yang berlebihan dengan tidak mengindahkan toleransi sebagai budaya luhur bangsa;
 - b. Kurangnya antisipasi dan respons masyarakat terhadap konflik sosial yang terjadi. Masyarakat diharapkan bisa melakukan fungsi deteksi dan cegah dini terkait potensi-potensi konflik atau permasalahan di daerah.
2. Bidang Ketahanan Bangsa:
 - a. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;
 - b. Kurang mandirinya ormas dalam partisipasi pembangunan
 - c. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;
 - d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial.
3. Bidang Politik Dalam Negeri :

- a. Penyebaran informasi yang bermuatan politik identitas, ujaran kebencian hingga hoax yang berujung terjadinya perpecahan atau polarisasi di masyarakat Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
- b. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu;

2.3.3. Tantangan dan Peluang

Adapun tantangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah antara lain:

- a. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an, NKRI, demokratisasi, revolusi karakter bangsa dan restorasi sosial budaya serta stabilitas Jawa Tengah dalam rangka memantapkan ideologi dan wawsan kebangsaan;
- b. Belum tertatanya struktur politik, pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis;
- c. Masih terdapat konflik perebutan dalam pengelolaan sumber daya alam di masyarakat sebagai dampak meningkatnya kegiatan penggalian, pertambangan dan industri;
- d. Terdapat gejala menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam masyarakat.
- e. Masih adanya sikap diskriminatif dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas di masyarakat.
- f. Masih adanya aksi dan kegiatan terorisme atau kekerasan.

Dari tantangan diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah memiliki sejumlah peluang sebagai berikut:

- a. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Kesadaran masyarakat untuk menjaga eksistensi bangsa melalui peningkatan wawsan kebangsaan, penanganan konflik dan peningkatan kewaspadaan dini;
- c. Kesadaran dan partisipasi masyarakat Jawa Tengah dalam berpolitik saat ini terus tumbuh;
- d. Semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat;
- e. Stabilnya sistem politik Jawa Tengah sehingga memberikan ruang bagi pengembangan sistem politik yang demokratis.

2.3.4. Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti

Untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di Jawa Tengah tersebut diperlukan solusi atau rekomendasi unuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun rekomendasi yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
2. Memberikan pemahaman akan pentingnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.
3. Melakukan sosialisasi terkait etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik, di masyarakat.
4. Meningkatkan Kinerja Pokja IDI untuk menyusun Rencana Aksi guna peningkatan skor IDI;
5. Peningkatan penggunaan Media Sosial dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila; partisipasi politik dan Wawasan Kebangsaan;
6. Melakukan koordinasi terhadap instansi terkait agar tidak terjadi kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah, dan konflik lahan dan sumber daya alam.
7. Melakukan sosialisasi mengenai pendidikan politik kepada seluruh elemen masyarakat;
8. Koordinasi dan kerjasama antara Badan Penyelenggara Pemilu dan aparat terkait dalam rangkaantisipasi isu negatif yang berkembang dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024;
9. Perlu tindakan tegas terhadap pelaku dugaan money politic;
10. Koordinasi antara Badan Penyelenggara Pemilu dan instansi terkait mengenai jumlah DPT.
11. Pemerintah perlu menyediakan tempat bagi masyarakat untuk dapat berekspresi dengan bebas dan tertib tanpa mengganggu kenyamanan pihak lain;
12. Lebih memperhatikan fasilitas bagi kelompok disabilitas dan lansia
13. Kaderisasi yang baik dalam partai-partai politik sehingga dapat menghasilkan politisi-politisi yang berintegritas dan kompeten;
14. Koordinasi bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, FKUB dan Ormas Keagamaan dalam menciptakan sikap toleransi.
15. Melakukan sinergitas dalam Penanganan Konflik Sosial dan Peningkatan Deteksi Dini dengan aparat keamanan seiring meningkatnya gangguan kamtibmas.
16. Melakukan sosialisasi P4GN dan PN

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan

membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Provinsi dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan provinsi.

Berikut Review terhadap Rancangan Awal RKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah :

**Tabel 2.3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jawa Tengah	Indeks Ideologi Pancasila	3,2	3.743.759.000	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jawa Tengah	Indeks Ideologi Pancasila	3,2	3.743.759.000
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jawa Tengah	Indeks Kinerja Ormas	79,82	6.140.351.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jawa Tengah	Indeks Kinerja Ormas	79,82	6.140.351.000
C	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Jawa Tengah	Indeks Penguatan Dampak Ekonomi	3,2	2.409.554.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Jawa Tengah	Indeks Penguatan Dampak Ekonomi	3,2	2.409.554.000
		Jawa Tengah	Indeks Toleransi	74,5	488.810.000			Indeks Toleransi	74,5	488.810.000
D	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jawa Tengah	Indeks Kewaspadaan Nasional	74,00	14.487.829.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jawa Tengah	Indeks Kewaspadaan Nasional	74,00	14.487.829.000
E	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jawa Tengah	IDI Aspek Kebebasan dan Aspek Lembaga Demokrasi	77,00	38.082.239.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jawa Tengah	IDI Aspek Kebebasan dan Aspek Lembaga Demokrasi	77,00	38.082.239.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan provinsi. Melalui forum tersebut akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Namun usulan yang masuk terlalu banyak dari jumlah usulan dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan penelaahan dan prioritas terhadap usulan yang ada. Berikut Usulan Program/Kegiatan Masyarakat hasil telaah :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
A.	HIBAH SOSIAL KEMASYARAKATAN				
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jawa Tengah	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ormas	3.000.000.000	Usulan Hibah Sosial Masyarakat
B.	HIBAH INSTANSI VERTIKAL				
1.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jawa Tengah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan	10.000.000.000	Usulan Hibah Instansi Vertikal yang terkait dengan Tupoksi Kesbangpol.
C	HIBAH PARPOL				
1.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jawa Tengah	Jumlah Laporan Pendataan Parpol	38.419.042.000	Usulan Hibah Parpol yang terkait dengan Tupoksi Kesbangpol.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah secara struktural dibawah Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, untuk itu arah kebijakan dari pusat pada tahun 2026 yang sesuai dengan bidang politik dan pemerintahan umum antara lain :

1. Penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu seperti melakukan kodifikasi UU Pemilu dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, peran partai politik yang akuntabel melalui revisi UU Partai Politik, lembaga perwakilan yang responsif, serta media dan pers yang berkualitas;
2. Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat;
3. Pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Penguatan inklusivitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas;
5. Penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat;
6. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, di antaranya melalui perluasan dan perlindungan ruang sipil untuk memperkuat keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial.

Dari kebijakan nasional tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah merumuskan beberapa program prioritas pada tahun 2026 antara lain :

1. Peningkatan sinergi dan koordinasi antar anggota Forkompinda serta optimalisasi peran anggota Forkompinda
2. Penguatan Ketahanan Nasional di Bidang Ipoleksosbud
3. Penguatan lembaga demokrasi dan menjaga ekosistem yang demokratis
4. Internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi Pancasila, serta pengembangan wawasan kebangsaan bagi penyelenggara negara dan Masyarakat;
5. Penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi;
6. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba.
7. Penguatan peran dan keterlibatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan tujuan dan sasaran Pemerintah Jawa Tengah serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk

kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun tahun 2025 – 2029 menetapkan tujuan sebagai berikut **”Meningkatkan Ketahanan Wilayah”**.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2025 – 2029, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya stabilitas politik;
- b. Meningkatnya ketahanan bangsa

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1**Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	74
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	1. Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	88,17
		2. Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko	2. Indeks Manajemen Resiko	Angka	2,9
2.	Meningkatkan ketahanan wilayah		Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD	Nilai	3,02
		1. Meningkatnya stabilitas politik	1. Indeks Ketahanan Politik	Nilai	3,12
		2. Meningkatnya ketahanan bangsa	2. Indeks Harmonisasi Indonesia	Nilai	6,5

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah hanya melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik, sedangkan fungsi lain (perlindungan masyarakat) dilaksanakan oleh OPD pelaksana fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah memiliki rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Jawa Tengah

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2026		2027			
						Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Ketahanan Wilayah							310.151.273.000		129.773.104.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
				Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD	Angka	3,02		3,03		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Meningkatnya Ketahanan Bangsa*						41.608.400.000		6.758.104.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
				Indeks Harmoni Indonesia*	Angka	6,5	41.608.400.000	6,6	6.758.104.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				2.608.336.000		1.510.000.000		
				Indeks Aktualisasi Pancasila**	Angka	76,31	2.608.336.000	77,09	1.510.000.000	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2026		2027			
						Target	Rp	Target	Rp		
		8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***			2.608.336.000		1.510.000.000			
				Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	86	1.407.000.000	87	1.370.000.000	Pokja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
				Prosentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan Bela Negara dan Karakter Bangsa	%	86	1.201.336.000	87	140.000.000	Pokja Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								
				Indeks Kinerja Ormas	Angka	78,26	36.626.664.000	78,91	4.200.000.000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								
				Persentase Masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan Ormas	%	86	2.276.664.000	87	950.000.000	Pokja Organisasi Kemasyarakatan	
				Persentase Penanganan Pengawasan Ormas	%	100	34.350.000.000	100	3.250.000.000	Pokja Organisasi Kemasyarakatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2026		2027			
						Target	Rp	Target	Rp		
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			2.373.400.000					
				Indeks ketahanan Ekonomi	Angka	2,89	1.169.434.000	2,9	250.000.000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	
		8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				1.169.434.000				
				Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi	%	88	1.169.434.000	89	250.000.000	Pokja Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
				Indeks Toleransi	Angka	75,4	1.203.966.000	76,5	798.104.000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	
		8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								
				Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	%	75,4	1.203.966.000	76,5	798.104.000	Pokja Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2026		2027			
						Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya Stabilitas Politik						268.542.873.000				
				Indeks Ketahanan Politik	Angka	3,12	268.542.873.000	3,13	310.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				61.299.273.000		15.000.000		
				Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Apek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Angka	80,47	58.070.318.000	80,71	95.515.000.000	Bidang Politik Dalam Negeri	
		8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2026		2027			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik	%	89,7	58.070.318.000	89,8	95.515.000.000	Pokja Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik	
				Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kebebasan	Angka	88,11	3.228.955.000	88,11	750.000.000	Bidang Politik Dalam Negeri	
		8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								
				Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi	%	89,6	95.890.000	89,7	450.000.000	Pokja Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	
				Presentasi masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik	%	89,7	3.133.065.000	89,8	300.000.000	Pokja Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				207.243.600.000		26.750.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2026		2027			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Indeks Kewaspadaan Nasional	Angka	74	207.243.600.000	74,5	26.750.000.000	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	
		8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				207.243.600.000		26.750.000.000		
				Persentase konflik sosial yang tertangani	%	100	205.533.449.000	100	24.900.000.000	Pokja Penanganan Konflik	
				Persentase masyarakat yang paham terhadap Kewaspadaan Nasional	%	80	1.710.151.000	83	1.850.000.000	Pokja Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2026		2027			
						Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						16.545.275.000		18.072.411.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	74		74,3		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					14.173.275.000		16.315.667.000			
				Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	88,17	14.173.275.000	88,2	16.315.667.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				14.173.275.000		16.315.667.000		
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat	%	100	14.173.275.000	100	16.315.667.000	SEKRETARIAT	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2026		2027			
						Target	Rp	Target	Rp		
				daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.867.419.000		9.945.667.000			
				Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	8.867.419.000	12	9.945.667.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			80.000.000		80.000.000			
				Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	4	80.000.000	4	80.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			203.500.000		300.000.000			
				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	203.500.000	100	300.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2026		2027			
						Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.218.135.000		1.710.000.000			
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	1.218.135.000	100	1.710.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			246.031.000		500.000.000			
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	32	246.031.000	32	500.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.848.131.000		2.905.000.000			
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	84	2.848.131.000	84	2.905.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			710.059.000		875.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2026		2027			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	352	710.059.000	352	875.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						2.372.000.000		1.756.744.000		
				Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Angka	2,9	2.372.000.000	2,95	1.756.744.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2.372.000.000				
				Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	%	100	2.372.000.000	100	1.756.744.000	SEKRETARIAT	
		X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.372.000.000		1.756.744.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
						2026		2027			
						Target	Rp	Target	Rp		
				Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	2.372.000.000	100	1.756.744.000	SUB BAGIAN PROGRAM	

4.2. Manajemen Resiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Manajemen resiko merupakan proses pengelolaan terhadap resiko mulai dari identifikasi, analisis dan evaluasi resiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen resiko dalam penyusunan Renja PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Manajemen resiko di level program dan kegiatan adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons kejadian tidak pasti yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan program dan kegiatan.

Tabel 4.2

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Resiko Sasaran/Program/Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	Adanya pemberian tanda terimakasih (gratifikasi)	25	Rendahnya kesadaran ormas mengenai bahaya ghratifikasi	Menuru nnya keperca yaan masyar akat dan pemerin tah kepada ormas yang bersang kuktan	Melakukan sosialisasi dan pembahama n kepada ormas tentangbaha yanya pemberian gratifikasi	Ormas dan Pemerintah	Semester 2
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	Penggunaa n Hibah yang tidak sesuai dengan peruntuka n	16	Kurangnya sosialisasi tentang penyelesaian dana hibah	Ketidak percaya an masyar akat dan pemerin tah kepada ormas penerim a hibah	Melakukan sosialisasi penggunaan dana hibah	Ormas dan Pemerintah	Semester 2
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Toleransi	Terjadinya konflik sara di masyaraka t	12	Menurunnya toleransi di masyarkat	Pemban gunan infrastr uktur terhamb at	Penguatan Toleransi Umat Beragama	Kepala Bidang	akhir tahun 2026
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN	Indeks Kewaspa	Tingginya kejadian	12	Kurangnya cegah dan deteksi dini	Tergang gunya kondusi	Sinergitas antar instansi	Kepala Bidang Kewaspada	Satu Tahun

Sasaran/Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	daan Nasional	konflik sosial		terhadap permasalahan n atau konflik yang muncul sehingga perlu diantisipasi sejak awal	fitas wilayah yang ada di Jawa Tengah	terkait serta sosialisasi kepada masyarakat terkait peran aktif masyarakat dalam penanganan konflik sosial	an Nasional dan Penangan an Konflik	

4.3. Dukungan Terhadap 36 Program Daerah

Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, didukung dengan kebijakan 11 program prioritas, 22 program intervensi, 61 program aksi, dan 42 program taktis. Seluruh program tersebut didorong untuk dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.

Tabel 4.3
Dukungan Terhadap 136 Program Daerah Tahun 2026

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Nomenklatur Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1.	Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	1. Pembentukan Paskibraka dan Pembangunan Karakter dan Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Purna Paskibraka Jateng	70 orang	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Disdikbud, Disporapar, Dinkes, Diskominfo, BKD, Biro Umum, BPSDMD, Biro Hukum
		2. Sosialisasi tatap muka terkait pendidikan wawasan kebangsaan kepada masyarakat	11.650 orang			Disdikbud, Disporapar, Dinkes, Biro Umum, BPSDMD, BKD
		3. Fasilitasi Sekolah Damai	1 kegiatan			Disdikbud
		1. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan	1 kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	Biro Kesra
		2. Pelatihan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan dalam organisasi kepemudaan	1 kegiatan			Disporapar dan Dinas Pendidikan
2.	Penguatan dan promosi moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri	1. Mempromosikan keberagaman dan keharmonisan di tengah masyarakat global	1 kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	Biro Kesra

3.	Mendorong penguatan Forum Kerukunan Antar Ummat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan	1. Fasilitas kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah	1 kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	Biro Kesra
		2. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Penghayat Kepercayaan	1 kegiatan			Biro Kesra
		3. Rembug Jagong Tokoh Agama dan Penghayat Kepercayaan	1 kegiatan			Biro Kesra
		1. Hibah FKUB	1 laporan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	Bappeda dan BPKAD
		2. Penguatan Ormas Lintas Etnis	1 kegiatan			Disporapar dan Dinas Pendidikan

		3. Hibah FPK	1 laporan			Bappeda dan BPKAD
		4. Fasilitas kegiatan kepada Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jawa Tengah	1 kegiatan			Disporapar dan Dinas Pendidikan
		1. Jambore : Harmoni Jawa Tengah	1 kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Disdikbud, Disporapar, Dinkes, Biro Umum
		2. Penguatan Kontra Radikalisme Ekstrimisme Bagi Masyarakat	1 kegiatan			DP3AKB
		3. Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda Lintas Etnis	1 kegiatan			Disporapar dan Dinas Pendidikan
		4. Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan	1 kegiatan			Disporapar dan Dinas Pendidikan
4.	Program Kerjasama Forkompinda	1. Rapat rutin atau khusus untuk membahas isu-isu penting di daerah dan menyepakati langkah-langkah penanganan yang terkoordinasi	6 laporan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Pemotdaker, Biro Hukum, Disnakertrans,
		2. Peningkatan monitoring pengawasan orang asing di Jawa Tengah	5 laporan			Disnakertrans, Disporapar, Disdik, Biro Hukum

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Nomenklatur Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
		3. Tim Kewaspadaan Dini Provinsi Jawa Tengah	5 laporan			Pemotdaker, Biro Hukum, Disnakertrans, Satpol PP
		4. Hibah Instansi Vertikal	5 laporan			BAPPEDA dan BPKAD
		5. Penanganan Konflik Sosial di wilayah Jawa Tengah	5 laporan			Dinas Sosial, BAPPEDA.
5.	Jawa Tengah Bebas Narkoba	1. Edukasi anti narkoba melalui kegiatan sosialisasi tatap muka, media sosial dan spanduk serta membentuk relawan dan satgas anti narkoba	4.600 orang	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	
6.	Mendorong terciptanya Pengarusutamaan Gender yang berkeadilan	1. Peningkatan Pemahaman Politik Bagi Perempuan dan kelompok rentan	1 kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Bidang Politik Dalam Negeri	DP3AKB
		2. Forum Penguatan Demokrasi	1 kegiatan			Biro Hukum, Bappeda, DPRD, BPKAD.

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Nomenklatur Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
		3. Pendidikan Politik Warga Negara	1 kegiatan	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Dinas Pendidikan, Dispora, DP3AKB
		4. Youth Politic Class	1 kegiatan			Dinas Pendidikan, Dispora

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana dalam penyusunannya kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran disusun dalam matrik dan bersifat indikatif untuk tahun disusun dan pedoman dalam penyusunan dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2026.

Dalam rangka mengoptimalkan rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, maka setiap unit pada lingkup Badan Kesbangpol yang secara langsung bertanggung jawab terhadap rencana kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk menuangkan rencana kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu RKA maupun DPA. Selain itu, pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan, setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melaksanakan pengendalian secara periodik melalui pelaporan, monitoring dan evaluasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dan diiringi peran aktif stakeholder yang ada di Provinsi Jawa Tengah antara lain Instansi Vertikal, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas/LSM, Partai Politik dan Aparat Keamanan. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Demikian Rencana Kerja (renja) 2026 disusun, semoga dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD.

TABEL 1
IDENTIFIKASI RISIKO

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya Stabilitas Politik	Indeks Ketahanan Politik	Unjuk rasa anarkis	Risiko Strategis	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan Pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. - Kesejangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat - Kinerja elit politik yang dinilai buruk oleh masyarakat - Aparat keamanan menggunakan cara represif dibandingkan dialogis dan kultural dalam menghadapi tuntutan masyarakat - Perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Kondusivitas daerah terganggu - Kerusakan Fasilitas umum - Terganggunya aktivitas ekonomi di wilayah yang terdampak - Meningkatnya konflik sosial 	Pemerintah dan masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya Stabilitas Politik	Indeks Ketahanan Politik	Terjadinya polarisasi di masyarakat	Risiko Strategis	- Perbedaan pandangan dan keyakinan terhadap isu politik tertentu.- Rendahnya literasi politik dan literasi digital masyarakat- Pemerintah dan media yang tidak berpihak/netral- Narasi hoaks, narasi kebencian dan political buzzer- Kurangnya konsolidasi dan koordinasi antar elemen pilar demokrasi dan kelompok strategis	- Stabilitas politik terganggu- Meningkatnya konflik sosial- Terjadinya konflik horizontal di masyarakat- Rendahnya kepercayaan publik pada institusi pemerintah- Kerentanan kohesiantar civil society	Pemerintah dan masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Strategis	Meningkatnya Ketahanan Bangsa	Indeks Harmoni Indonesia	Disintegrasi sosial	Risiko Strategis	- Adanya ketimpangan sosial di masyarakat- Konflik SARA- Rendahnya implementasi nilai-nilai Pancasila	- Hubungan sosial antar kelompok masyarakat menjadi tidak harmonis- Perpecahan bangsa- Meningkatnya intoleransi - Hilangnya nilai sosial didalam masyarakat- Munculnya paham terorisme dan ekstremisme	Pemerintah dan masyarakat
4	Sasaran Strategis	Meningkatnya Ketahanan Bangsa	Indeks Harmoni Indonesia	Terganggunya harmoni di masyarakat	Risiko Strategis	- Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi - Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian - kurangnya pemahaman terhadap keberagaman - Persaingan atas sumber daya alam	- Munculnya konflik sosial - Intoleransi - Menghambat pembangunan	Pemerintah dan masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Sasaran Strategis	Meningkatnya Ketahanan Bangsa	Indeks Harmoni Indonesia	Meningkatnya penyalagunaan narkoba	Risiko Strategis	- Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak buruk narkoba- Lemahnya pengawasan terutama dari pemerintah- Beban masalah perekonomian yang semakin sulit	- Tingkat kejahatan dan penyakit sosial meningkat- Rusaknya mental generasi muda- Tingkat kejahatan dan penyakit sosial meningkat	Pemerintah dan masyarakat
6	Sasaran Strategis	Meningkatnya Ketahanan Bangsa	Indeks Harmoni Indonesia	Munculnya konflik sosial	Risiko Strategis	- Perebutan sumber ekonomi - Lemahnya pengawasan pemerintah - Pembangunan yang tidak merata	- Mengganggu proses pembangunan - Merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan ormas - menciptakan keresahan dan ketakutan di masyarakat	Pemerintah dan masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Banyak keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan	Risiko Operasional	- Kompetensi petugas kurang memadai- Proses administrasi yang berbelit- Sarana dan prasarana kurang memadai	Akuntabilitas OPD kepada masyarakat rendah	Pemerintah dan masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kegagalan mencapai tujuan organisasi	Risiko Operasional	1. Ketidakjelasan sasaran dan target pada perencanaan 2. Sumber daya yang tidak memadai	1. Penurunan kepercayaan masyarakat 2. Inefisiensi sumber daya	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
2	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Akuntabilitas rendah	Risiko Kepatuhan	1. Kurangnya dukungan institusional untuk transparansi dan akuntabilitas 2. sistem pengawasan yang tidak memadai	Terjadinya Penyalahgunaan wewenang dan korupsi	Masyarakat dan Pemerintah Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesalahan dalam administrasi keuangan	Risiko Fraud	1. Human eror 2. Kurangnya pengawasan internal	Infisiensi sumber daya	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
4	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penurunan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada kepuasan masyarakat	Risiko Operasional	1. SOP pelayanan tidak jelas 2. SDM kurang terlatih 3. Sarana dan prasarana kurang memadai	Penurunan kepuasan masyarakat	Masyarakat dan Pemerintah Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Terhambatnya pelaksanaan program-program	Risiko Reputasi	1. SOP pelayanan tidak jelas 2. SDM kurang terlatih 3. Sarana dan prasarana kurang memadai	Penurunan kepercayaan masyarakat	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
1	Sasaran Program	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Aktualisasi Pancasila	Munculnya paham radikal dan ideologi transnasional	Risiko Operasional	- Lemahnya pemahaman dan penghayatan nilai Pancasila oleh sebagian masyarakat- Pengaruh globalisasi dan teknologi digital yang mempermudah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila	Mengganggu stabilitas politik dan kondusivitas wilayah	Pemerintah dan Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Program	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	Timbulnya masalah pelanggaran hukum oleh ormas	Risiko Hukum	- Premanisme Berkedok Ormas - Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum	Menurunnya kepercayaan masyarakat dan pemerintah kepada ormas yang bersangkutan	Pemerintah, Masyarakat
2	Sasaran Program	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Indeks Kinerja Ormas	Penggunaan Hibah yang tidak sesuai dengan peruntukan	Risiko Kepatuhan	Kurangnya sosialisasi tentang pertanggungjawaban dana hibah	Ketidakpercayaan masyarakat dan pemerintah kepada ormas penerima hibah	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
3	Sasaran Program	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Toleransi	Terjadinya konflik berbasis identitas agama di masyarakat	Risiko Strategis	Menurunnya toleransi di masyarakat	Kerukunan hidup bermasyarakat terganggu, kondusivitas wilayah tidak terwujud	Masyarakat dan Pemerintah Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Sasaran Strategis	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks ketahanan Ekonomi	Terjadinya krisis ekonomi di masyarakat	Risiko Strategis	Munculnya pengangguran, kurangnya dukungan terhadap ekonomi lokal, ketergantungan pada modal besar, kurangnya gotong royong dalam pembangunan ekonomi dan ketidaksiapan dalam persaingan global	Dampak krisis ekonomi terhadap ketahanan masyarakat memunculkan keresahan masyarakat, kerawanan dan ketidakstabilan dan bisa berakibat pada generasi muda, salah satunya maraknya peredaran narkoba.	Masyarakat, pemerintah daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Program	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kebebasan	Menurunnya skor IDI aspek kebebasan akibat terbatasnya ruang berekspresi, berpendapat, dan berkumpul di masyarakat.	Risiko Operasional	Pembatasan kebebasan berekspresi, rendahnya literasi politik, dan disinformasi digital.	Penurunan skor IDI pada aspek kebebasan, meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, melemahnya partisipasi publik dalam proses politik, serta menurunnya citra demokrasi daerah di tingkat nasional.	Pemerintah, masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Program	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Apek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Menurunnya skor IDI aspek kapasitas lembaga demokrasi akibat lemahnya koordinasi dan peran lembaga politik serta masyarakat sipil.	Risiko Operasional	Koordinasi lemah antar lembaga dan minim kolaborasi lintas sektor.	Penurunan skor IDI pada aspek kapasitas lembaga demokrasi, menurunnya efektivitas dan kemandirian lembaga politik serta masyarakat sipil, melemahnya fungsi kontrol dan partisipasi publik, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi di daerah.	Pemerintah dan masyarakat
1	Sasaran Program	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Indeks Kewaspadaan Nasional	Tingginya kejadian konflik sosial	Risiko Strategis	Kurangnya cegah dan deteksi dini terhadap permasalahan atau konflik yang muncul sehingga perlu diantisipasi sejak awal	Terganggunya kondusifitas wilayah yang ada di Jawa Tengah	Masyarakat dan Pemerintah Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Program	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Indeks Kewaspadaan Nasional	Gratifikasi Hibah Instansi Vertikal	Risiko Fraud	Penerima hibah atau pemberi tidak sepenuhnya memahami peraturan atau hukum terkait gratifikasi dan hibah	Pemberian Hibah Instansi Vertikal yang tidak tepat sasaran	Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal

1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Kegagalan mencapai tujuan organisasi	Risiko Operasional	1. Tidak tercapainya sasaran dan target pada perencanaan 2. Sumber daya yang tidak memadai	1. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran 2. Inefisiensi sumber daya	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
---	------------------	---	---	--------------------------------------	--------------------	---	--	----------------------------------

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Akuntabilitas rendah	Risiko Kepatuhan	1. Kurangnya dukungan institusional untuk transparansi dan akuntabilitas 2. sistem pengawasan yang tidak memadai	Terjadinya Penyalahgunaan wewenang dan korupsi	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Terhambatnya pelaksanaan program-program	Risiko Reputasi	Rendahnya implementasi kegiatan kepada masyarakat	Penurunan kepercayaan masyarakat	Masyarakat dan Pemerintah Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Tidak terbayarnya gaji dan TPP pegawai	Risiko Operasional	Kurang cermatnya dalam menghitung anggaran gaji dan TPP	Hak pegawai tidak dipenuhi	Pemerintah Daerah
5	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Target pajak tidak tercapai	Risiko Kepatuhan	Pembayaran pajak tidak sesuai dengan peraturan	Terganggunya pembangunan	Pemerintah Daerah dan masyarakat
6	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Terlambatnya pengajuan TU dan GU	Risiko Operasional	Sumber daya yang tidak memadai	Terganggunya pelaksanaan kegiatan	Pemerintah dan masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen laporan keuangan tidak tersusun sesuai dengan peraturan yang berlaku	Risiko Operasional	Sumber daya yang tidak memadai	Tidak terwujudnya akuntabilitas kepada masyarakat	Pemerintah dan masyarakat
8	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Adanya korupsi	Risiko Fraud	Tidak ada integritas	Kerugian negara	Pemerintah dan masyarakat
9	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Tidak bisa terbayarnya pengeluaran kantor	Risiko Kepatuhan	Tidak lengkapnya dokumen SPJ	Menurunnya kepercayaan masyarakat	Masyarakat dan Pemerintah Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Terjadinya mark up	Risiko Fraud	Kurangnya pengawasan internal	Terjadinya kerugian negara	Pemerintah dan masyarakat
11	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Terjadinya mark up	Risiko Fraud	Kurangnya pengawasan internal dan Menurunnya integritas	Terjadinya kerugian negara	Pemerintah dan masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen pengadaan tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan	Risiko Kepatuhan	Dokumen pengadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan	Pembatalan kontrak pengadaan dan pemutusan kerja sama jika dokumen tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau proses tidak mengikuti aturan sesuai perundang-undangan	Pemerintah Daerah dan masyarakat
13	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Tidak terbayarnya klaim asuransi	Risiko Kepatuhan	Penyedia jasa tidak berkomitmen	Terjadnya kerugian akibat tidak bisa dibayarkan klaim	Pemerintah dan masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Kualitas SDM menurun	Risiko Operasional	Pengiriman pendidikan dan pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan	Kinerja organisasi menurun	Pemerintah dan masyarakat
15	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Kualitas SDM menurun	Risiko Operasional	Terbatasnya anggaran	Pelayanan kepada masyarakat terganggu	Pemerintah dan masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Pemetaan kompetensi pegawai tidak berdasarkan data kepegawaian	Risiko Operasional	Tidak terarsipnya data kepegawaian dengan baik	Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi	Pemerintah Daerah dan masyarakat
17	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Pemetaan kompetensi pegawai tidak berdasarkan data kepegawaian	Risiko Operasional	Tidak terarsipnya data kepegawaian dengan baik	Keterlambatan kenaikan jabatan	Pemerintah Daerah dan masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Kepuasan masyarakat dan internal organisasi menurun	Risiko Operasional	Kualitas SDM menurun	Kinerja organisasi menurun dan Pelayanan kepada masyarakat terganggu	Pemerintah dan masyarakat
19	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Kepuasan masyarakat dan internal organisasi menurun	Risiko Operasional	Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana	Kinerja organisasi menurun dan Pelayanan kepada masyarakat terganggu	Pemerintah dan masyarakat
20	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Kepuasan masyarakat dan internal organisasi menurun	Risiko Operasional	SOP pelayanan umum tidak ditaati oleh pegawai	Kinerja organisasi menurun dan Pelayanan kepada masyarakat terganggu	Pemerintah dan masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Terganggunya pelaksanaan program-program organisasi	Risiko Operasional	Kualitas SDM menurun	Kinerja organisasi menurun dan Pelayanan kepada masyarakat terganggu	Pemerintah Daerah dan masyarakat
22	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Terganggunya pelaksanaan program-program organisasi	Risiko Operasional	Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana	Kinerja organisasi menurun dan Pelayanan kepada masyarakat terganggu	Pemerintah Daerah dan masyarakat
23	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Terganggunya pelaksanaan program-program organisasi	Risiko Operasional	SOP pelayanan umum tidak ditaati oleh pegawai	Kinerja organisasi menurun dan Pelayanan kepada masyarakat terganggu	Pemerintah Daerah dan masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Terjadinya mark up	Risiko Fraud	Kurangnya pengawasan internal	Terjadinya kerugian negara	Pemerintah dan masyarakat
25	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Terjadinya mark up	Risiko Fraud	Menurunnya integritas	Terjadinya kerugian negara	Pemerintah dan masyarakat
26	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta	Risiko Kepatuhan	Pelanggaran kontrak oleh penyedia	Kerugian negara	Pemerintah Daerah dan masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
27	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Keterlambatan barang yang dipesan	Risiko Kepatuhan	Pelanggaran kontrak oleh penyedia	Terganggunya kinerja organisasi	Pemerintah dan masyarakat
28	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Tidak terbayarnya rekening listrik, air dan telpon	Risiko Operasional	Pemborosan penggunaan rekening air, listrik dan telpon	Pemborosan penggunaan rekening air, listrik dan telpon	Pemerintah dan masyarakat
29	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Terjadinya pencurian di kantor	Risiko Kepatuhan	Kinerja tenaga satpam menurun	Kepuasan masyarakat menurun	Pemerintah dan masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
30	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Kebersihan kantor kurang terjaga	Risiko Kepatuhan	Kinerja tenaga cleaning service menurun	Kepuasan masyarakat menurun	Pemerintah Daerah dan masyarakat
31	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Banyaknya asset kantor rusak berat	Risiko Operasional	Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Kegiatan operasional kantor terganggu	Pemerintah dan masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
32	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Banyaknya asset kantor rusak berat	Risiko Operasional	Peggunaan asset kantor tidak sesuai SOP	Kegiatan operasional kantor terganggu	Pemerintah dan masyarakat
33	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Hilangnya asset kantor	Risiko Kepatuhan	Daftar inventaris barang tidak diperbaharui	Kerugian negara	Pemerintah dan masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan Bela Negara dan Karakter Bangsa	Lemahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam bela negara dan lunturnya karakter bangsa	Risiko Strategis	Gempuran arus informasi dan globalisasi yang tidak dimanfaatkan dengan baik	Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah	Pemerintah dan Masyarakat
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi sehingga pesan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tidak menjangkau seluruh masyarakat	Risiko Operasional	Kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Penurunan cakupan pemahaman publik terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan rentan terhadap munculnya narasi alternatif yang berlawanan.	Pemerintah dan Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan Ormas	- Adanya konflik internal (dualisme kepemimpinan, mengutamakan golongan tertentu)- Banyak bermunculan atau terbentuknya ormas baru tapi tidak paham arah dan tujuan dari berdirinya ormas	Risiko Operasional	Perbedaan tujuan oleh individu atau dalam suatu kelompok organisasi	Timbulnya dualisme kepengurusan, konflik internal dan eksternal serta pembubaran ormas	Masyarakat, Ormas tsb dan Pemerintah
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Penanganan Pengawasan Ormas	Tidak terwujudnya kemandirian Ormas	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman ormas mengenai prinsip dibentuknya Ormas untuk kemitraan dengan pemerintah, ketergantungan Ormas terhadap bantuan pemerintah	Pelanggaran hukum Ormas misalnya ormas terlibat dalam premanisme, mengganggu pembangunan	Masyarakat dan Pemerintah Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Intoleransi antar umat beragama dan penghayat kepercayaan	Risiko Strategis	Kurangnya sosialisasi terhadap kerukunan umat beragama serta rendahnya toleransi di masyarakat dan rendahnya peran tokoh masyarakat dalam kerukunan umat beragama	Perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik agama dalam kehidupan bermasyarakat	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
4	Sasaran Program	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi	Maraknya pelanggaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda	Risiko Hukum	Kerawanan sosial karena generasi muda tidak siap untuk berkompetisi global serta lemahnya karakter gotong royong dalam mengatasi dampak perekonomian	Keterlibatan generasi muda dalam kejahatan (narkoba) semakin merusak ketahanan masyarakat.	Masyarakat dan pemerintah daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik	Potensi instabilitas sosial dan politik	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi	Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi.	Masyarakat dan pemerintah daerah
2	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi	Masyarakat tidak percaya lagi terhadap lembaga politik, Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengembangan demokrasi	Risiko Operasional	kebijakan politik yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, Keterbatasan jangkauan kegiatan, apatisme politik, disinformasi.	Masyarakat bersikap apatis terhadap lembaga politik	pemerintah dan masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentasi masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik	penyebaran hoax dan disinformasi politik, literasi politik dan digital rendah	Risiko Operasional	Rendahnya Akses Pendidikan Politik, Kurangnya program edukasi politik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	Hoaks lebih mudah tersebar, menciptakan lingkungan informasi yang tidak sehat	Pemerintah Daerah
1	Sasaran Strategis	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang tertangani	Kondusifitas wilayah Jawa Tengah terganggu	Risiko Kemitraan	Koordinasi antar instansi belum terjalin dengan baik	Tidak maksimal penanganan konflik sosial di Jawa Tengah sehingga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah Jawa Tengah terhambat.	Pemerintah Daerah dan Instansi lain

